



## Identifikasi Tingkat Kekumuhan di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura

Soleman Patai<sup>1\*</sup>, Deasy Widyastomo<sup>2</sup>, Marulitua Manalu<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Fakultas Teknik, Universitas Cenderawasih, Indonesia

Alamat: jalan kampwolker, Kelurahan Yabansai Distrik Heram

Korespondensi penulis: [solepatai@gmail.com](mailto:solepatai@gmail.com)\*

**Abstract.** *This research discusses the identification of slum level in Mandala Sub-district, North Jayapura District, Jayapura City. The research employs a qualitative descriptive approach with primary data obtained from observations, interviews, and documentation. Mandala Sub-district faces issues of development inequality and high population density, including unsuitable living conditions in its residential areas. The identification results indicate that the slum level in Mandala Sub-district falls under the category of "Mild Slum (KR)" according to the Ministry of Public Works and Housing Regulation No. 2 of 2016. The recommended approach for handling slum areas is through redevelopment, which includes improving housing and the surrounding environment, enhancing the quality of neighborhood roads, providing better access to clean water, managing wastewater, waste disposal, and fire protection measures. This research is expected to provide an overview and recommendations for more effective and sustainable handling of slum areas, involving the collaboration of the government, private sector, and community.*

**Keywords:** *Slum level, Development inequality, Population density, Residential environment, Mild Slum (KR), Slum area handling.*

**Abstrak** Penelitian ini membahas identifikasi tingkat kekumuhan di Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data primer dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kelurahan Mandala menghadapi masalah ketimpangan pembangunan dan kepadatan penduduk tinggi, termasuk kondisi lingkungan permukiman yang tidak layak huni. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa tingkat kekumuhan di Kelurahan Mandala termasuk "Kumuh Ringan (KR)" berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2016. Penanganan kawasan permukiman kumuh disarankan dengan pendekatan pemugaran, meliputi perbaikan rumah dan lingkungan, peningkatan kualitas jalan lingkungan, penyediaan air bersih yang lebih baik, penanganan air limbah, persampahan, dan proteksi kebakaran. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan rekomendasi untuk penanganan kawasan permukiman kumuh secara lebih efektif dan berkelanjutan, melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat.

**Kata Kunci :** Tingkat kekumuhan, Masalah ketimpangan pembangunan, Kepadatan penduduk, Lingkungan permukiman, Kumuh Ringan (KR), Penanganan kawasan permukiman kumuh.

### 1. LATAR BELAKANG

Lonjakan pertumbuhan jumlah penduduk di perkotaan akibat dampak urbanisasi saat ini telah memberikan warna tersendiri dalam kehidupan masyarakat kota Jayapura salah satunya di Kelurahan Mandala. Sebagai salah satu faktor penyebab dari ketimpangan laju pembangunan di kota dibandingkan dengan di desa yang ditunjukkan dengan kondisi sosial demografis di kawasan kumuh seperti kepadatan penduduk yang tinggi, kondisi lingkungan permukiman yang tidak layak huni dan tidak memenuhi Syarat Pelayanan Minimal (SPM)

dan fasilitas sosial berupa fasilitas pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana sosial budaya, urbanisasi sudah seharusnya dikelola dengan baik sehingga tidak menjadi beban pemerintah dan dapat berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Perumahan dapat diartikan sebagai suatu cerminan dari diri pribadi manusia, baik secara perorangan maupun dalam suatu kesatuan dan kebersamaan dengan lingkungan alamnya dan dapat juga mencerminkan taraf hidup, kesejahteraan, kepribadian, dan peradaban manusia penghuninya, masyarakat ataupun suatu bangsa (Yudhohusodo, 1991:1). Mengkaji kondisi fisik kawasan permukiman kumuh sebagaimana dalam kondisi fisik dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, diantaranya kondisi fisik bangunan, kondisi jalan lingkungan, kondisi drainase lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, kondisi pengaman kebakaran. Menjelaskan beberapa arahan pada potensi dan masalah dari program penanganan permukiman kumuh, sehingga hal ini dapat sebagai pertimbangan dasar dalam rekomendasi berupa arahan pada permasalahan.

## **3. METODE PENELITIAN**

Untuk mengidentifikasi kondisi fisik permukiman kumuh di Kelurahan Mandala ialah melakukan pendekatan survey dengan metode analisis deskriptif dan spasial (keruangan). Dengan melakukan analisis spasial, diharapkan muncul informasi baru yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dibidang yang dikaji. Sebagai sebuah metode, analisis spasial berusaha untuk membantu perencana dalam menganalisis kondisi permasalahan berdasarkan data dari wilayah yang menjadi sasaran bervariasi sehingga membentuk perbedaan yang signifikan yang membedakan satu lokasi dengan yang lainnya. Dengan demikian jarak, arah, dan hubungan antara lokasi suatu objek dalam suatu wilayah dengan objek di wilayah yang lain akan memiliki

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Mandala**

Permukiman yang tergolong dalam permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak teratur, tidak terencana dan menurunnya kualitas permukiman. Dalam penelitian ini penulis menggunakan standar tingkat kekumuhan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat NOMOR 2 Tahun 2016 ada 3(tuga), yaitu:

- 1) Tingkat kekumuhan ringan yaitu interval antara 19-44;
- 2) Tingkat kekumuhan sedang yaitu interval antara 45-70;
- 3) Tingkat kekumuhan berat yaitu interval antara 71-95.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kekumuhan yang terjadi di Kelurahan Mandala terlebih dahulu kita harus mengidentifikasi terhadap 7 (tujuh) aspek kondisi fisik yang membuat kawasan tersebut menjadi kumuh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel. 1.

**Tabel 1. Analisis Kondisi Bangunan**

No	Aspek	Kriteria	Rumus	Parameter	Nilai	Perhitungan	Nilai Kekumuhan
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	$\frac{\text{Jumlah bangunan tidak teratur (unit)}}{\text{Jumlah bangunan keseluruhan (unit)}} \times 100\%$	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	$= \frac{143}{221} \times 100\% = 76,06\%$	5
				51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3		
				25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1		
		b. Tingkat Kepadatan Bangunan	$\frac{\text{Jumlah bangunan dengan kepadatan tidak sesuai ketentuan (unit)}}{\text{Jumlah bangunan keseluruhan (unit)}} \times 100\%$	76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5	0	0
				51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3		
				25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1		
		c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	$\frac{\text{Jumlah bangunan tidak sesuai teknis (unit)}}{\text{Jumlah bangunan keseluruhan (unit)}} \times 100\%$	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5	$= \frac{44}{221} \times 100\% = 23,40\%$	0
				51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3		

Sumber : Hasil Analisis

Dari hasil tabel analisis diatas dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Berdasarkan hasil analisis tingkat kepadatan bangunan sangat tinggi dan masih terdapat bangunan yang tidak sesuai standar teknis. Berdasarkan hasil wawancara status kepemilikan lahan sebagian masyarakat tidak memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB)

**Tabel 2. Analisis Kondisi Jaringan Jalan Lingkungan**

No	Aspek	Kriteria	Rumus	Parameter	Nilai	Perhitungan	Nilai Kekumuhan
2	Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	$\frac{\text{Luas kawasan tidak terlayani jalan (ha)}}{\text{Luas kawasan}} \times 100\%$	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5	0	0
				51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3		

		100% Luasan Kawasan Keseluruhan (ha)	25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1		
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Panjang Jalan lingkungan yang rusak (m) = Panjang Jalan lingkungan keseluruhan (m) x 100%	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5	= $\frac{559}{979} \times 100\%$ = 57,10%	3
51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk			3			
25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk			1			

Sumber : Hasil Analisis

Dari hasil tabel analisis diatas dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Berdasarkan hasil analisis rata-rata jalan lingkungan sudah tercakupi namun dibebberapa titik terdapat

kondisi jalan yang rusak dengan kualitas kontrusi yang sudah lama sehingga kondisi jalan yang mulai buruk.

**Tabel 3. Analisis Kondisi Air Minum**

No	Aspek	Kriteria	Rumus	Parameter	Nilai Perhiyungan	Nilai Kekumuhan
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketidakterdediaan Akses Aman Air Minum	Jumlah kk tidak terakses air minum berkualitas x 100%	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	0
			Jumlah kk keseluruhan			
		b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air	Jumlah kk tidak terpenuhi air minum berkualitas x 100%	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5	3
			Jumlah kk keseluruhan		= $\frac{128}{235} \times 100\%$ = 54,47%	

Sumber : Hasil Analisis

Dari hasil tabel analisis diatas dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Berdsarkan hasil analisis kondisi air minum sebagian masyarakat yang mendapatkan suplai bersih tidak sesuai standar cukup tinggi di lokasi penelitian. Karena sebagian masyarakat menggukan sumur bor yang kondisi kawasan padat penduduk dan sangat berdekatan dengan laut.

**Tabel 4. Analisis Kondisi Drainase**

No	Aspek	Kriteria	Rumus	Parameter	Nilai	Perhitungan	Nilai Kekumuhan
4	Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan mengalirkan air	$\frac{\text{Luas kawasan yang terkena genangan}}{\text{Luas kawasan keseluruhan}} \times 100\%$	76% - 100% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	5	0	0
				51% - 75% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	3		
				25% - 50% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	1		
		b. Ketidakterseediaan Drainase	$\frac{\text{Luas kawasan tidak tersedia drainase}}{\text{Luas kawasan keseluruhan}} \times 100\%$	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan	5	$= \frac{80}{315} \times 100\% = 25,40\%$	1
				51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan	3		
				25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan	1		

Sumber : Hasil Analisis

Dari hasil tabel analisis diatas dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Berdasarkan hasil analisi kondisi drainase cukup baik. Dibeberapa titik tidak terdapat drainase seperti masyarakat yang berada yang berada kawasan pesisir dan kondisi drainase yang terdapat genangan akibat pasang surut air laut.

**Tabel 5. Analisis Kondisi Air Limbah**

No	Aspek	Kriteria	Rumus	Parameter	Nilai	Perhitungan	Nilai Kekumuhan
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Standar Teknis	$\frac{\text{sistem air limbah tidak sesuai standar teknis}}{\text{Luas kawasan kumuh (ha)}} \times 100\%$	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5	$= \frac{20}{3,72} \times 100\% = 8,51\%$	0
				51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3		
				25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1		
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Standar Teknis	$\frac{\text{Sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis}}{\text{Luas kawasan kumuh (ha)}} \times 100\%$	51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5	$= \frac{131}{3,72} \times 100\% = 55,74\%$	3
					3		

Sumber : Analisis

Dari hasil tabel analisis diatas dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Berdasarkan hasil analisi kondisi pengelolaan air limbah kurang baik karena sebagian masyarakat membuang limbah rumah tangga membuang limbah rumah tangga langsung ke drainase dan sarana prasaranan yang kurang memadai sehingga masyarakat yang berada di kawasan pesisir dan berada di atas laut langsung membuang limbah rumah tangga ke laut dan masyarakat masih menggunakan WC terbuka yang langsung dibuang kelaut.

**Tabel 6. Analisis Kondisi Air Bersih**

No	Aspek	Kriteria	Rumus	Parameter	Nilai	Perhitungan	Nilai Kekumuhan		
6	Kondisi	a. Prasarana dan	$\frac{\text{sarpras pengolahan sampah tidak sesuai persyaratan teknis (ha)}}{\text{Luas kawasan kumuh (ha)}} \times 100\%$	76% - 100% area memiliki sarpras	5	$= \frac{235}{100} \times 3,72 = 100\%$	5		
	Pengelolaan	Sarana Persampahan		pengelolaan persampahan yang tidak				3,72	
	Persampahan	tidak sesuai dengan persyaratan teknis		memenuhi persyaratan teknis					
					51% - 75% area memiliki sarpras			3	
					pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis				
6		b.Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis	$\frac{\text{Sistem pengolahan sampah tidak seausai standar teknis (ha)}}{\text{Luas kawasan kumuh (ha)}} \times 100\%$	76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5	$= \frac{235}{100} \times 3,72 = 100\%$	5		
				51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3				
6		c. Tidak	$\frac{\text{Sarpras pengelolaan sampah tidak terpelihara}}{\text{Luas kawasan kumuh (ha)}} \times 100\%$	76% - 100% area memiliki sarpras	5	0	0		
		Terpeliharanya		persampahan yang tidak terpelihara					
		Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	3				

Sumber : Analisis

Dari hasil tabel analisis diatas dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Berdasarkan hasil analisi di lokasi penelitian kondisi prsampahan sangan beradat karena tidk tersedianya sarana dan prasaranan persampahan sehinggah masyarakat membuang sampah ke lahan kosong untuk langsung dibakar, ada juga masyarakat yang kurang sadar akan kebersihan sehinggah membuang sampah ke dainase dan masyarakat yang berada di kawasan pesisir dan diatas laut yang langsung membuang sampah ke laut. □

**Tabel 7. Analisis Kondisi Proteksi Kebakaran**

	Aspek	Kriteria	Rumus	Parameter	Nilai	Perhitungan	Nilai Kekumuhan	
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	a.Ketidakterersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Luas kawasan tidak tersedia prasarana proteksi kebakaran (ha) = $\frac{\text{Luas kawasan kumuh (ha)}}{\text{Luas kawasan kumuh (ha)}} \times 100\%$	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5	=100%	5	
		b.Ketidakterersediaan Sarana Proteksi Kebakaran		51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3			
				25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1			
		Luas kawasan tidak tersedia sarana proteksi kebakaran (ha) = $\frac{\text{Luas kawasan kumuh (ha)}}{\text{Luas kawasan kumuh (ha)}} \times 100\%$	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	=100%			5
			51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3				
			25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1				

Sumber : Analisis

Dalam penelitian ini sesuai dengan standar tingkat kekumuhan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NOMOR 2 Tahun 2016. Dari hasil identifikasi di Kelurahan Mandala tingkat kekumuhan adalah 35 berada pada interval 19-44 yaitu Kumuh Ringan. Dari hasil tabel diatas 7 (tujuh) aspek berdasarkan identifikasi kondisi Bangunan Gedung , Pengelolaan Persampahan dan Proteksi Kebakaran dengan kondisi Kumuh Berat, sedangkan pada aspek Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase Lingkungan dan Pengelolaan Air Limbah dengan kondisi Kumuh Ringan.

### **Analisis Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Mandala**

Penanganan kawasan permukiman kumuh berdasarkan kondisi faktual dan kebijakan penanganan permukiman kumuh dirumuskan dari tiap- tiap indikator yang telah diidentifikasi sebelumnya. Untuk menentukan pola- pola peningkatan kualitas permukiman kumuh adapun pertimbangan- pertimbangan dari Tipologi Perumahan dan Permukiman Kumuh, legalitas lahan serta tingkat kekumuhan. Hasil identifikasi tingkat kekumuhan perumahan dan permukiman kumuh dilokasi penelitian adalah Kumuh Ringan (KR).

Dari hasil observasi di lokasi penelitian status legalitas lahan di RT05,RT06 dan RT08 dari hasil wawancara RT setempat disebutkan status legalitas lahan sebagian sudah memiliki status legal, sabagian tidak memiliki status legal dan sedangkan permukiman diatas laut yang statusnya illegal.

Dari hasil penelitian berdasarkan lokasi kawasan permukiman kumuh yaitu kumuh ringan maka pola penanganan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016.

## **Penanganan kawasan permukiman kumuh**

### **a. Kondisi Bangun Gedung**

Hasil identifikasi kondisi bangunan gedung yang cukup padat dan berdempetan dan kurang layak jadi penanganan yang dilakukan adalah perbaikan rumah dan lingkungan permukiman yang layak huni dan meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman

### **b. Kondisi Jalan Lingkungan**

Hasil identifikasi kualitas jalan lingkungan yang cenderung sempit berupa tangga beton dan beberapa titik terdapat jalan rusak namun kualitas jalan masih perlu ditingkatkan dengan memperbaiki tangga beton dengan ditambahkan pegangan tangga,dan pengaspalan jalan lingkungan.

### **c. Kondisi Air Minum**

Hasil identifikasi kondisi air minum di Kelurahan Mandala sebagian masyarakat sudah mendapatkan air dari PDAM dan sebagian lainnya menggunakan air dari rumus, Kondisi ini perlu peningkatan karna sebagian masyarakat belum mendapatkan suplai air bersih yang layak dan peningkatan PDAM di Kelurahan Mandala

### **d. Kondisi Drainase Lingkungan**

Hasil identifikasi kondisi drainase di kelurahan mandala kondisi drainase cukup baik namun di beberapa titik masih terdapat genangan di drainase, sehingga kebutuhan jaringan drainase harus memiliki kualitas jaringan jalan yang baik bentuk maupun penempatan harus selaras dengan ciri-ciri fisik dan karakteristik klasifikasi sistem jaringan jalan (fungsi, kelas, dan tipe jalan). Ini untuk memberikan gambaran dalam berbagai kebijakan yang akan dilakukan melalui standar teknis jaringan drainase yang berlaku.



#### **e. Kondisi Air Limbah**

Hasil identifikasi kondisi pengelolaan air limbah rumah tangga yang masih kurang karena pembuangan limbah rumah tangga yang langsung ke drainase dan masyarakat yang berada di kawasan pesisir dan berada di atas air langsung membuang limbah rumah tangga langsung ke laut dan memiliki MCK yang terbuka dan langsung dibuang ke laut, maka perlu difasilitasi dari

#### **f. Kondisi Pengelolaan Persampahan**

Hasil identifikasi kondisi pengelolaan persampahan di Kelurahan Mandala sangat kurang karena tidak ada tersedianya tempat sampah rumah tangga, tidak ada gerobak sampah lingkungan dan Untuk itu kebutuhan prasarana jaringan persampahan yang perlu dilakukan yang berlaku minimal dalam setiap RT disediakan 1 bak sampah komunal serta sistem pengangkutan yang terorganisir secara berkelanjutan, ada pula peningkatan persampahan di permukiman di atas air berikut skema p

#### **g. Kondisi Proteksi Kebakaran**

Hasil identifikasi kondisi proteksi kebakaran di lapangan cukup beresiko terjadinya kebakaran di lokasi penelitian karena kondisi rumah cukup tidak adanya proteksi kebakaran dan juga kondisi bangunan yang rapat dan jalan lingkungan yang sempit tidak memungkinkan kendaraan kebakaran untuk bisa masuk saat terjadi kebakaran untuk penanganannya sesuai dengan kondisi perlu penyediaan hidran di setiap RT, penyediaan alat pemadam kebakaran Portable Menyediakan/Membangun bak-bak Penampung air yang hanya digunakan saat terjadi kebakaran dan Menyediakan Alkon-alkon untuk Pertolongan Pertama di kawasan daerah pesisir pantai

### **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Dari hasil dan pembahasan mengidentifikasi tingkat keumuhan di (RT 05, RT06, RT08- RW001) Kelurahan Mandala menyimpulkan bahwa hasil observasi (pengamatan langsung) serta data yang di dapatkan di lokasi penelitian, sebagai berikut;
  - a. Hasil identifikasi tingkat keumuhan dengan nilai tinggi terjadi pada aspek kondisi bangunan dengan nilai ketidakteraturan bangunan 76,06% Tidak layak, Kondisi persampahan dengan hasil identifikasi tingkat keumuhan dengan nilai 100% karena tidak tersedia sarana prasarana persampahan, Kondisi Proteksi kebakaran hasil identifikasi dengan nilai 100% karena tidak tersedia proteksi kebakaran
  - b. Hasil identifikasi tingkat keumuhan dengan nilai rendah terjadi pada aspek Jalan lingkungan hasil identifikasi menunjukkan masih terdapat jalan rusak dan jaringan

jalan kurang layak engan nilai 57,10%, Kondisi air bersih hasil identifikasi pada umumnya sudah tercukupi namun ada sebagian warga yang masih menggunakan sumur bor dan yang kurangnya jaringan pemipaan sehingga banyak warga menggunakan selang. Warga yang belum tercakupi air bersih dengan nilai 54,47%, Kondisi air limbah yang masih kurang mmadi dan tidak sesuai standar teknis dengan nilai 55,74%. Seangkan Hasil identifikaasi kondisi drainase yang kumuh ringan dengan nilai 25,40%.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, sebagai saran yang dapat diberikan untuk memperkuat upaya perencanaan dan penanganan kawasan permukiman kumuh adalah:

1. Pemerintah Kota Jayapura perlu memperbaiki kondisi fisik dan menata kawasan kumuh di Kelurahan Mandala :
  - a. Meningkatkan Kualitas rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
  - b. Peningkatan kualitas jalan lingkungan
  - c. Meningkatkan jangkauan pelayanan air bersih
  - d. Perbaiki drainase dan meningkatkan kualitas drainase
  - e. Perbaiki MCK untuk pengelolaan air limbah
  - f. Menambahkan sarana dan prasarana persampahan
  - g. Membangun Hydran air untuk proteksi kebakaran
2. Untuk mencega dan meningkatkan kualitas kawasan kumuh pemerintah perlu melakukan upaya-upaya penanganan mulai dari kondisi fisik maupun sosial dan ekonomi untuk penanganan kawasan dari kumuh ringah menjadi kawasan tidak kumuh.
3. Pemerintah Kota Jayapura dalam melakukan penanganan kawasan kumuh secara komprehensif dengan melibatkan instansi terkait, pihak swasta dan masyarakat

### **6. DAFTAR REFERENSI**

- Adisasmata, R. (2010). Pembangunan pedesaan dan perkotaan. Graha Ilmu.
- Arikunto, S. (2010). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktek. Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Distrik Jayapura Utara dalam angka. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Kota Jayapura dalam angka. Badan Pusat Statistik.
- Budihardjo, C. (2009). Sistem informasi geografis: Suatu pengantar. Staff Akademik Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI.

Budiharjo, E. (1997). Tata ruang perkotaan. Penerbit Alumni.

Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman. (2016). Panduan pendampingan penyusunan Raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Doxiadis, C. A. (1968). An introduction to the science of human settlements - Ekistics. Hutchinson of London.

Eko. (1984). Sejumlah masalah permukiman kota. Penerbit Alumni.

Kuswartojo, T., & Salim, S. A. (1997). Perumahan dan pemukiman yang berwawasan lingkungan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sugiyono. (2008). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D. Alfabeta.

Suparlan, P. (1993). Kemiskinan di perkotaan (Cetakan kedua). Yayasan Obor Indonesia.